

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ForBALI sebagai gerakan sosial yang berperan sebagai aktor advokasi yang merupakan gabungan dari elemen-elemen masyarakat Bali, yaitu dari Desa Adat, LPM, Dusun, hingga STT (Seka Truna-Truni). ForBALI juga mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, diantaranya seniman, musisi dan individu-individu peduli lingkungan, sehingga organisasi ini berkembang semakin kuat dalam memperjuangkan agenda yang diusungnya yaitu kelestarian lingkungan hidup (global environment) dan hak kaum marjinal sebagai bagian dari isu internasional di memasuki era globalisasi, yaitu pada penolakan reklamasi Teluk Benoa di Bali.

Dalam menjalankan agendanya, ForBALI menjalankan berbagai strategi yang masuk dalam konsep *Transnational Advocacy Networks* (TAN) meliputi *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, serta *Accountability Politics*. Dalam proposisi TAN dapat dijelaskan bahwa interaksi antara dua belah pihak dapat dijelaskan bahwa isu kelestarian lingkungan hidup dan hak minoritas merupakan isu *mainstream* yang diusung oleh negara-negara maju. Dengan demikian Reklamasi Teluk Benoa merupakan isu yang berkaitan dengan advokasi yang dilakukan gerakan sosial bersama afiliasi dalam dan luar negerinya. ForBALI merupakan gerakan sosial yang berperan sebagai aktor advokasi yang mengedepankan langkah prefentif dan persuasif dengan menjadikan isu kelestarian lingkungan hidup Teluk Bali dan hak kaum marjinal yaitu kepentingan masyarakat adat Bali untuk meraih simpati kalangan masyarakat dalam dan luar negeri secara luas.

Advokasi ForBALI pertama adalah *Information Politics*, yaitu advokasi yang menekankan pada penyebarluasan informasi secara luas kepada masyarakat dalam dan luar negeri. Sedangkan media yang digunakan yaitu internet, surat kabar, radio hingga penyebarluasan informasi secara langsung. Penyebarluasan informasi ini mendapatkan reaksi positif dari berbagai kalangan dalam lingkup Bali, hingga skala nasional dan internasional. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi yang terus meningkat, hingga pada level akademisi, kebudayaan, seniman dan elemen-elemen masyarakat lainnya, baik dalam dan luar negeri. Upaya-upaya ini berhasil menjadikan Teluk Benoa di Bali sebagai proyek yang masih harus dikaji langsung untuk kemudian dapat dibatalkan.

Kemudian advokasi ForBALI kedua adalah *Symbolic Politics*, dimana gerakan ini menggunakan simbol-simbol dan *event* kegiatan secara langsung dan tidak langsung. Beberapa *event* secara langsung berupa diskusi tingkat nasional dengan menghadirkan beberapa praktisi terkemuka untuk menegaskan bahwa reklamasi Teluk Benoa merupakan bagian dari pelanggaran terhadap kelestarian lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat Bali, event ini diikuti oleh kalangan akademisi, aktivis dan elemen-elemen masyarakat lainnya yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai. Sedangkan kegiatan dalam membangun *Symbolic politics*, secara tidak langsung dijalankan melalui *event* pagelaran musik ataupun perayaan tradisional dengan sasaran agar simbol dan pesan tercapai pada kalangan masyarakat secara umum di Bali.

Selanjutnya advokasi ForBALI ketiga adalah *Leverage Politics* yaitu upaya untuk memperluas dan mengembangkan jaringannya, baik simpatisan ataupun pihak-pihak yang memberikan dukungan secara nyata yang masuk *supported* ForBALI. Pada akhirnya ForBALI dalam memperluas cakupan aksinya karena mendapatkan berbagai masukan dan kegiatan operasional dari kalangan artis, akademisi,

budayawan dan lain-lainnya yang pada beberapa kesempatan menyuarakan tentang reklamasi Teluk Benoa sebagai proyek yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan hak kaum marjinal.

Advokasi ForBALI yang terakhir adalah *Accountability Politics*, yaitu upaya untuk mewujudkan konsistensi gerakan, bukan hanya gejolak (*riot*) hanya bersifat aksi pasang-surut. Dari tahun 2013-2017 ForBALI telah menjalankan kegiatan dan agenda yang bersifat kontinyu dan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Faktor *Accountability Politics* juga dapat dilihat dari berkembangnya reklamasi Teluk Benoa sebagai isu internasional yang ditandai dengan semakin banyak media asing dan respon dari pemimpin/pejabat luar negeri atas kasus ini, diantaranya dari Australia yang sekaligus menunjukkan bahwa persoalan tentang reklamasi Teluk Benoa telah mendorong respon dari negara lain sebagai hubungan dari hubungan antar pemerintah (*intergovernmental relationship*) yang mediasi atau ditengahi oleh ForBALI sebagai aktor advokasi maupun gerakan sosial.

B. Saran

Melalui penelitian ini, berhasil dirumuskan beberapa saran yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan kalangan akademisi bahwa:

- a. Kepada para *stakeholder*, khususnya pemerintah pusat diharapkan dapat memprioritaskan masalah kelestarian lingkungan hidup dan kaum marjinal sebagai pertimbangan utama, bukan sekedar menjalankan percepatan pembangunan tanpa memperhatikan hal tersebut. Berkaitan dengan Reklamasi Teluk Benoa hendaknya elemen-elemen terkait yang mendukung ForBALI hendaknya terus mengawal proyek tersebut, terlebih lagi proyek prestisius ini sarat akan kepentingan pihak kapitalis pemilik modal pusat.
- b. Kepada para akademisi program studi ilmu hubungan internasional bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut

tentang perbandingan reklamasi di Indonesia dengan negara lain, sehingga dapat diketahui apakah proyek-proyek serupa merupakan hal yang bersifat mendesak ataukah hanya kepentingan segelintir orang pemilik modal.